

2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena berkat rahmatNya jua lah **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2023. Dalam LAKIP disajikan analisis atas kinerja yang telah dicapai dan dikaitkan dengan Perencanaan Strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun kami berharap penyusunan LAKIP ini tetap ada manfaatnya, minimal sebagai gambaran untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai dan juga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Untuk itu kami mohon saran, tanggapan serta kritik yang membangun, untuk lebih menyempurnakan laporan ini di masa-masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah.

Amuntai, Februari 2024

KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



dr. Hj. LILY INDERIANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750507 200501 2 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang.....	I - 1
B. Aspek Strategi Organisasi	I - 2
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisas	I - 3
D. Sistematika Penyusunan Laporan	I - 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II - 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III - 1
A. Pengukuran Capaian Kinerja	III - 1
B. Analisis Capaian Kinerja	III - 2
C. Capaian Program dan Kegiatan	III - 9
D. Akuntabilitas Keuangan	III - 17
BAB IV PENUTUP	IV - 1

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**BAB I
PENDAHULUAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya “*Rule Government*” telah bergeser menjadi “*Good Governance*”. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas (*Accountability*), transparansi (*Transparency*), keterbukaan (*Openes*) dan kerangka hukum (*Rule of law*). Salah satu tuntutan publik dalam penyelenggaraan pemerintah adalah yang 4 (empat) macam di atas dalam pengelolaan keuangan negara agar menjadi pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, pelaporan keuangan dan kinerja di lingkungan instansi pemerintah juga merupakan bagian yang penting guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintahan.

Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

Untuk menilai keberhasilan/ kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak yang ditimbulkannya.

Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek input, output, tapi juga sampai pada out come, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.

Penyusunan LAKIP merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sama halnya dengan fungsi manajemen pada umumnya, SAKIP meliputi kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Penyusunan LAKIP Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama Tahun Anggaran 2023. Dimana LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

B. ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2° sampai 3° Lintang Selatan dan 115° sampai 116° Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Hulu Sungai Utara adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan tentang pencapaian sasaran peningkatan kualitas SDM Indonesia yang salah satunya memperkuat kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana di daerah, dan merupakan landasan hukum ditetapkannya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tersebut Pengendalian penduduk dan keluarga berencana menitik beratkan pada ; 1) perencanaan kependudukan ; 2) pengendalian kuantitas penduduk ; 3) pengembangan kualitas penduduk ; 4) pelayanan keluarga sejahtera dan Advokasi ; 5) penurunan angka kelahiran (TFR) ; 6) mobilitas penduduk ; 7) penduduk rentan ; 8) pembangunan keluarga ; 9) penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.

Permasalahan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang perlu penanganan lebih lanjut adalah :

1. Peningkatan kualitas kesertaan ber-KB menjadi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
2. Rendahnya kesertaan KB pria sehingga perlu mengoptimalkan peserta KB pria yang sudah ada sebagai motivator melalui pembinaan kelompok KB pria;
3. Masih rendahnya cakupan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga;
4. Tidak semua keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia mengikuti kegiatan kelompok BKB,BKR,BKL hal ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut dan juga masih kurangnya SDM dan keterampilan kader dalam penyuluhan serta seringnya pergantian kader;
5. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi, komunikasi dan informasi dalam berbagai media dan metode, sehingga pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana masih kurang;dan
6. Meningkatkan integrasi kampung KB dengan lintas sektor.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesertaan ber KB menjadi MKJP;
2. Peningkatan peran pria dalam ber KB;
3. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih mengalami banyak permasalahan, seperti lemahnya pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL, serta akses permodalan kelompok UPPKS;
4. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi, komunikasi dan informasi dalam berbagai media dan metode, sehingga pemahaman masyarakat tentang program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) masih kurang; dan
5. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tertinggal, melalui program Kampung KB;

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Program dan Data;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
2. Bidang Pengendalian Penduduk;
3. Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi;
4. Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
5. Unit Pelaksana Teknis; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat

1. Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala SKPD melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, tata usaha, keuangan dan asset.

2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset;
 - b. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset;
 - c. penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
3. Unsur – unsur Organisasi Sekretariat adalah :
 - a. Sub Bagian Program dan Data;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Pengendalian Penduduk

1. Bidang Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk di Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. Pelaksanaan NSPK bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang sistem informasi keluarga;
 - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan Kota;
 - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi

1. Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana dan Advokasi di Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana dan advokasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana dan advokasi;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana dan advokasi;
 - d. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan advokasi;
 - i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang keluarga berencana dan advokasi;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

1. Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Pelaksanaan NSPK bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Balita;

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;
- f. Pemantauan dan evaluasi bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

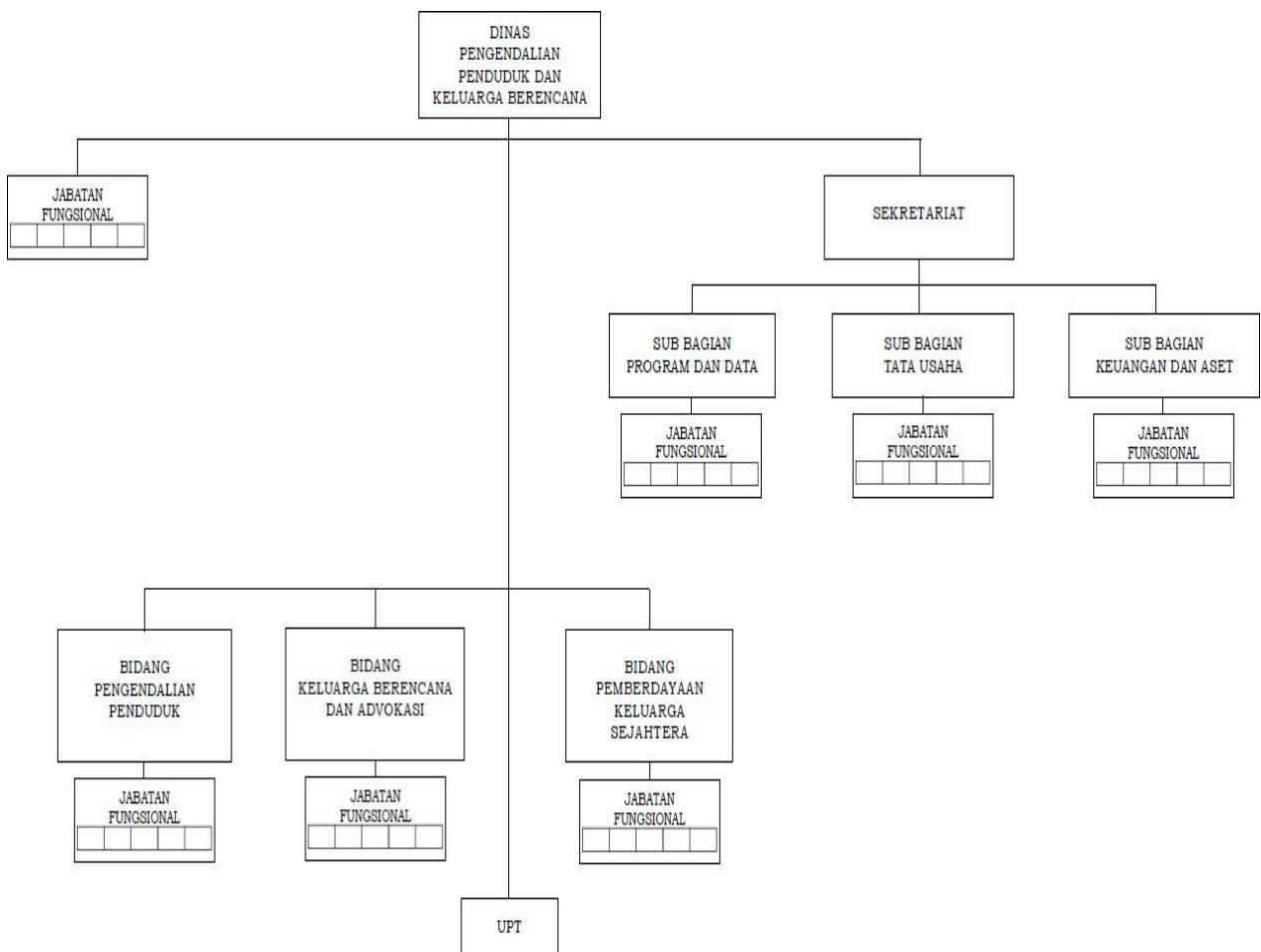
Unit Pelaksana Teknis

Unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021:



Dalam memberikan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 20 orang dan non PNS 10 orang.

Adapun keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia PNS

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	20 Orang
2	Tingkat Pendidikan	
	▪ SD	-
	▪ SMP	-
	▪ SLTA	2 Orang
	▪ D1	-
	▪ D3	4 Orang
	▪ S1	10 Orang
	▪ S2	4 Orang
3.	Pangkat dan Golongan	
	▪ Pembina Utama Muda (IV/c)	-
	▪ Pembina Tingkat I (IV/b)	-
	▪ Pembina (IV/a)	6 Orang
	▪ Penata Tingkat I (III/d)	5 Orang
	▪ Penata (III/c)	1 Orang
	▪ Penata Muda Tingkat I (III/b)	4 Orang
	▪ Penata Muda (III/a)	2 Orang
	▪ Pengatur Tk. I (II/d)	2 Orang
	▪ Pengatur (II/c)	-
	▪ Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
	▪ Pengatur Muda (II/a)	-
	▪ Juru Muda (I/a)	-

Tabel I.2. Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Non PNS

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai Non PNS	10 Orang
2	Tingkat Pendidikan	
	▪ SD	1 Orang
	▪ SLTP	-
	▪ SLTA	3 Orang
	▪ D3	-
	▪ S1	6 Orang

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**BAB II
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana ketentuan umum pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023 – 2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 Visi Daerah untuk perencanaan jangka panjang adalah “RAWA MAKMUR 2025”, yang mengandung pemahaman “terciptanya kesejahteraan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara optimal melalui pemanfaatan dan perekayasaan terhadap berbagai potensi sumberdaya alam/biotik berupa hamparan rawa yang luas; potensi sumberdaya manusia; potensi ekonomi; potensi sosial budaya; potensi ruang dan berbagai potensi yang bersifat lokal lainnya, serta kemampuan dalam memanfaatkan peluang internal dan eksternal sehingga dapat membawa kemakmuran bagi segenap masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Guna mewujudkan Rawa Makmur 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dilaksanakan melalui berbagai MISI yang merupakan langkahlangkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan visi Rawa Makmur 2025. MISI-MISI ini meliputi :

- 1. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan IPTEK dan IMTAQ**, yakni pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, terampil, memiliki kemandirian dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupannya, memiliki kualitas kehidupan yang baik, serta tetap memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan yang baik dan diimplementasikan sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 2. Pemantapan perekonomian daerah yang berkualitas**, yakni arah pembangunan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju. Secara agregat tercipta struktur perekonomian yang kuat, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dan relatif tinggi, yang merupakan perwujudan dari transformasi ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer (pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri).
- 3. Pengembangan prasarana dan sarana fisik kewilayahan**, dimana arah pembangunan ditujukan untuk menciptakan ketersediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya dalam menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.

4. **Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik**, yakni menciptakan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas, yang ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang profesional, sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dapat memberi pelayanan yang maksimal yang disertai penegakkan supremasi hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
5. **Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik berupa sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati secara lestari dan berkelanjutan serta mewujudkan pengembangan pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan.**

Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara implementatif, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi sertamenjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyeraskan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Penggambaran tujuan yang akan dicapai dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 pada dasarnya adalah terciptanya kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat di masa-masa yang akan datang yang meliputi aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek infrastruktur daerah. Selain itu juga adanya komitmen untuk taat dan patuh terhadap hukum dan aturan perundangundangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Secara sosial dan ekonomi diinginkan adanya perbaikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat yang meliputi perbaikan perekonomian masyarakat dan semakin majunya kualitas sumberdaya manusia sebagai kebutuhan mendasar yang dilakukan secara bertahap melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan pengembangan wilayah, aspek pemberdayaan masyarakat dan lainnya dalam rangka meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal juga penting dan ditujukan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat yang ditopang oleh peningkatan infrastruktur yang mendukung berbagai aspek kehidupan dengan tetap memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan yang diinginkan dan hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 sampai tahun 2026 dan merupakan kelanjutan dari tujuan-tujuan lima tahun sebelumnya meliputi:

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi publik;
3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah;
4. Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
5. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat;
6. Meningkatnya perekonomian daerah;
7. Menurunnya angka kemiskinan;
8. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar;
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
10. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB berlandaskan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026, serta didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk target kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 – 2026 yang terakomodir dalam Renstra DPPKB ditentukan dengan mengambil patokan berdasarkan target Provinsi Kalimantan Selatan dan target Nasional yang tercantum dalam (Rencana Strategis) RENSTRA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Serta adanya perubahan data Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin anak dan hamil akan mempengaruhi data pencapaian Unmeet need dan peserta KB Aktif. Kemudian dengan adanya pendataan keluarga tahun 2021 menyebabkan penurunan data unmeet need dan peserta KB aktif sehingga mempengaruhi penetapan target unmeet need dan peserta KB aktif untuk tahun 2023-2026.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 serta terintegrasi dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 adalah :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPPKB
2. Meningkatkan Kesertaan ber-KB

Sedangkan indikator sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.1 Tabel Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik							
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah							
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	A / 83,01	A / 83,51	A / 84,01	A / 84,51
Tujuan : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing							
Sasaran : Meningkatnya pengendalian penduduk							
2.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kesertaan Ber- KB	Peserta KB Aktif (%)	68	69	70	71
			Unmet Need (Kebutuhan ber-KB) (%)	7,75	7,57	7,3	7

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- 2) Meningkatkan kesertaan ber-KB

Tabel II.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) DPPKB	A / 83,01
Meningkatkan kesertaan ber-KB	Peserta KB Aktif (%)	68
	Unmet Need (kebutuhan ber- KB) (%)	7,75

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pada tabel berikut ini :

Tabel II.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik			
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat daerah dengan perangkat daerah
			Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Tujuan : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Sasaran : Meningkatnya pengendalian penduduk			
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya pengendalian penduduk	Peningkatan penyelenggaraan Keluarga Berencana	Peningkatan partisipasi KB Aktif
			Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB
			Peningkatan Ketahanan Keluarga

3. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel lampiran

4. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di rubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 kemudian dirubah kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan peraturan tersebut, terdiri dari 4 Program, 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

Total anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU Tahun 2023 sebesar Rp. 4.384.715.000,00 dan setelah pergeseran (penambahan DAK Fisik dan Non Fisik) dan perubahan menjadi Rp. 9.703.512.830,00 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
BELANJA DAERAH	9.703.512.830,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.707.958.230,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.270.568.600,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.263.485.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.083.600,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.405.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.405.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.183.050,00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.800,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.281.350,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.400.000,00

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	25.833.900,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.670.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.680.380,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.680.380,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.121.200,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.163.200,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.508.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.450.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	433.870.000,00
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	69.045.000,00
Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	48.555.000,00
Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10.515.000,00
Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	9.975.000,00
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	364.825.000,00
Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	13.595.000,00
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	66.830.000,00
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	160.200.000,00
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.416.176.400,00
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	977.099.400,00
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.400.000,00
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	163.999.400,00

Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130.400.000,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	481.900.000,00
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.400.000,00
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	896.620.000,00
Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	192.000.000,00
Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	248.720.000,00
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	455.900.000,00
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	472.957.000,00
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38.250.000,00
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	203.801.000,00
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	181.906.000,00
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.900.000,00
Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	24.100.000,00
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.069.500.000,00
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	744.000.000,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	325.500.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.145.508.200,00
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.145.508.200,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	380.380.000,00
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.609.400,00

Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.614.700.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	77.819.400,00
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.613.000,00
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	20.386.400,00

Tabel II.5 Rincian Alokasi Belanja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)	%
1.	BELANJA OPERASI	9.519.373.830,00	98,10
	Belanja Pegawai	3.274.485.000,00	33,75
	Belanja Barang dan Jasa	6.244.888.830,00	64,36
2.	BELANJA MODAL	184.139.000,00	1,90
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.139.000,00	1,90
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA	9.703.512.830,00	100,00

5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja ini memuat rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dilaksanakan melalui kegiatan - kegiatan Dinas pada tahun 2023 baik yang mendapat dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mempertimbangkan sumberdaya telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2023 sebagai mana yang tercantum dalam tabel LAKIP.

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.

Gambaran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 061/05/DPPKB/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam tahun anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kesertaan ber-KB

Tabel III.1 Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPPKB	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) DPPKB	A / 83,01	A* / 81,76*	100%

2.	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Peserta KB Aktif	68%	77,59%	114,10%
		Unmet Need (kebutuhan ber-KB)	7,75%	5,89%	14,47%

Catatan : Bertanda bintang Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Penghitungan persentase pencapaian untuk indikator kinerja peserta KB aktif dengan kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik menggunakan rumus 1 yaitu :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan penghitungan persentase pencapaian untuk indikator kinerja unmet need (kebutuhan ber-KB) dengan kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja menggunakan rumus 2 yaitu :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 adalah cukup berhasil.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPPKB	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) DPPKB	A / 83,01	A* / 81,76*	100%

Catatan : Bertanda bintang Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Pencapaian Indikator kinerja nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja ditargetkan kategori "A dengan nilai 83,01". Untuk Penilaian SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 dijadwalkan tahun 2024 setelah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan di Tahun 2023 penilaian SAKIP dari Inspektorat adalah untuk SAKIP 2022, dimana nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 adalah kategori "A" dengan nilai 81,76.

Untuk pencapaian sasaran tersebut diatas dihitung dengan melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran "Akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", selama Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui program dan Kegiatan dengan hasil sebagai berikut :

Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%
Persentase Tertatanya Administras Kepegawaian Daerah	100%
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Milik daerah	100%

Dengan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat melakukan perbaikan nilai akuntabilitas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana karena dengan tersedia sarana dan prasarana kerja yang optimal dengan didukung SDM yang handal sehingga sasaran-sasaran yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas benar-benar dapat direalisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. ASN diharapkan dapat menjalankan dan memahami tupoksi yang telah diberikan kepada setiap ASN;
2. Menyamakan dan menyatukan persepsi tentang tugas fungsi dalam Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
3. Melakukan atau memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan wawasan ASN;
4. Memberikan reward dan Punishmen kepada ASN.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka peningkatan NILAI SAKIP ini secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Dinas dengan cara mencari solusi terhadap kendala yaitu :

1. Adanya upaya untuk meningkatkan pencapaian sasaran yang sudah di sepakati bersama;
2. Melakukan perbaikan kinerja ASN dengan pemberian reward dan Punishmen;
3. Fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan dan pengembangan ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Memberikan keleluasaan bagi ASN yang kreatif dalam melakukan pengembangan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kab. Hulu Sungai Utara.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatkan Kesertaan Ber-KB

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase peserta KB aktif dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Peserta KB Aktif	68%	77,59%	114,10%
		Unmet Need (kebutuhan ber-KB)	7,75%	5,89%	131,58%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2023 telah tercapai dengan baik.

Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu : Program Pengendalian Penduduk (sebanyak 2 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (sebanyak 4 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (sebanyak 1 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan).

a. Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang **di targetkan 68% realisasi 77,59% atau 114,10%** lebih dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah peserta KB Aktif 27.434 Akseptor dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 35.357 (Sumber: <https://newsiga.bkkbn.go.id/>) target nasional **62,92%**, sedangkan pada tahun 2022 tercapai **73,80%** dan tahun 2021 tercapai **81,57%**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah antara lain :

- Adanya perubahan sistem pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya menggunakan rekapitulasi (Rek.Kab.F/I/Dal/13), sejak tahun 2022 sudah menggunakan By Name By Address (New Siga (Sistem Informasi Keluarga)) sehingga data yang disajikan lebih akurat dan akuntabel.
- Adanya dukungan dana dan sarana dari BKKBN Perwakilan Propinsi Kal-Sel serta dari DAK Fisik dan Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja;
- Adanya rapat bulanan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan;
- Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerja KB agar dapat meningkatkan sosialisasi program Bangga Kencana;

- Peningkatan promosi dan kemitraan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang Program Bangga Kencana, memperkuat jaringan kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan lainnya ditingkat kecamatan dan desa, memperkuat dan mengoptimalkan promosi dan KIE melalui kegiatan momentum strategi;
 - Penambahan akses dan fasilitas pelayanan KB di Puskesmas, peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB khususnya tentang MKJP di seluruh Desa utamanya di daerah kampung KB, serta meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait seperti PKK, IBI, TNI, MUI dan BAZNAS dalam rangka mendorong KB MKJP.
- b. Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) yang **di targetkan 7,75%** realisasi **5,89% atau 131,58%**, dengan penjelasan Jumlah Unmet Need 2.084 dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 35.357 (Sumber: <https://newsiga.bkkbn.go.id/>) target nasional **7,70%**, sedangkan pada tahun 2022 tercapai **13,82%** dan tahun 2021 tercapai **2,38%**.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :
- Adanya perubahan sistem pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya menggunakan rekapitulasi (Rek.Kab.F/I/Dal/13), sejak tahun 2022 sudah menggunakan By Name By Address (New Siga (Sistem Informasi Keluarga)) sehingga data yang disajikan lebih akurat dan akuntabel.
 - Dengan memaksimalkan fungsi dari PKB Penghubung dan penetapan sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru dan hamil;
 - Dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi PKB agar pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa;
 - Adanya pelatihan untuk peningkatan SDM PKB dalam pengelolaan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
 - Adanya dukungan dana dan sarana dari BKKBN Perwakilan Propinsi Kal-Sel serta dari DAK Fisik dan Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja;
 - Adanya rapat bulanan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan;
 - Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerja KB agar dapat meningkatkan sosialisasi Program Bangga Kencana

- Peningkatan promosi dan kemitraan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang Program Bangga Kencana, memperkuat jaringan kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan lainnya ditingkat kecamatan dan desa, memperkuat dan mengoptimalkan promosi dan KIE melalui kegiatan momentum strategis.
- Penambahan akses dan fasilitas pelayanan KB di Puskesmas, peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB khususnya tentang MKJP di seluruh Desa utamanya di daerah kampung KB, serta meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait seperti PKK, IBI, TNI, MUI dan BAZNAS dalam rangka mendorong KB MKJP.

Untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditopang oleh beberapa sasaran kinerja yang ada di Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi, Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Eselon III, pada tahun 2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 Realisasi Kinerja Eselon III Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan dan pengendalian penduduk	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	100%
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	65%	45,83%	70,51%
2.	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peserta KB Baru / PB	5.086 Akseptor	1.984 Akseptor	39,01%
3.	Terwujudnya keluarga yang mandiri, tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	62,44 Indeks (Skala 0-100)	63,63 Indeks (Skala 0-100)	101,91%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perlu dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru memasuki tahun pertama dari target 4 (empat) tahun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

Untuk perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan terhadap Renstra DPPKB, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 serta terhadap Renstra DPPKB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Capaian Kinerja (9/6)	Capaian Tahun 2023 terhadap Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja DPPKB	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) DPPKB	A	A	100%	A / 83,01	A* / 81,76*	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kesertaan ber-KB	Persentase peserta KB Aktif	82 %	73,80 %	90%	68%	77,59%	114,10%	126,78%	109,28%
		kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	2,0%	13,82 %	14,47%	7,75%	5,89%	131,58%	144,70%	118,85%

*Nilai Catatan : Bertanda bintang Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Memasuki tahun pertama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, pencapaian persentase peserta KB aktif pada tahun 2023 adalah sebesar 77,59 % atau 90% dari target akhir Renstra 2023-2026 sebesar 71%, sedangkan untuk indikator menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) tercapai 5,89% atau 118,85% dari target akhir Renstra 2023-2026 sebesar 7%. Pencapaian kinerja tersebut dapat tercapai melalui upaya memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi PKB agar pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB.

C. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk matrik sasaran/kinerja dengan program dan kegiatan DPPKB dapat dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan di bawah ini :

Tabel III.4 Matrik Capaian Sasaran/Kinerja dengan Realisasi Program / Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik						
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah						
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	A/ 83,01	A / 81,76*	A / 100%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)	100%	100%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	22 Orang	100%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	#DIV/0!
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	43 Unit	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	100%

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing						
Sasaran : Meningkatnya pengendalian penduduk						
2.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Peserta KB Aktif (%)	68%	77,59%	114,10%
			Unmet Need (Kebutuhan ber-KB) (%)	7,75%	5,89%	131,58%

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	19 SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	100%
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	65%	45,83%	70,51%
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal	65%	48,50%	74,62%
Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100%
Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	20 Organisasi	20 Organisasi	100%

Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	20 Organisasi	20 Organisasi	100%
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	1 Unit	1 Unit	100%
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Baru / PB	5.086 Akseptor	1.984 Akseptor	39,01%
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	50 Organisasi	50 Organisasi	100%

Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	10 Laporan	100%
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	10 Laporan	100%
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk	10 Laporan	10 Laporan	100%
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina	21 Orang	21 Orang	100%
Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	96 Organisasi	96 Organisasi	100%
Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	21 Laporan	21 Laporan	100%

Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	219 Orang	219 Orang	100%
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10%	9,51%	95,10%
	Persentase peserta KB baru pria	5,53%	2,32%	41,95%
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45 Laporan	45 Laporan	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	691 Orang	691 Orang	100%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	10 Unit	100%
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7 Laporan	7 Laporan	100%
Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	60 Orang	60 Orang	100%

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	65%	65%	100%
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	21 Dokumen	21 Dokumen	100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	21 Kampung KB	21 Kampung KB	100%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB	70%	73%	103,57%
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB	70%	73%	103,57%
	Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR	65%	54%	83,40%
	Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL	60%	64%	106,40%
	Persentase Keluarga yang ikut UPPKS	5%	4%	82,40%
	Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa	8%	33%	418%
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1546 Unit	1546 Unit	100%

Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 Orang	80 Orang	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	723 Orang	723 Orang	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	120 Kelompok	120 Kelompok	100%
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	100%

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Capaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Dari program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 Program, 13 kegiatan dan 46 sub kegiatan.

Total anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU Tahun 2023 sebesar Rp. 4.384.715.000,00 dan setelah pergeseran (penambahan DAK Fisik dan Non Fisik) dan perubahan menjadi Rp. 9.703.512.830,00, adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.5 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp.)		%
	Anggaran	Realisasi	
BELANJA DAERAH	9.703.512.830,00	8.904.370.076,00	91,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.707.958.230,00	3.409.391.043,00	91,95
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.270.568.600,00	3.022.030.415,00	92,40
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.263.485.000,00	3.015.691.615,00	92,41
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.083.600,00	6.338.800,00	89,49
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.405.000,00	8.955.000,00	86,06
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.405.000,00	8.955.000,00	86,06
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.183.050,00	101.825.580,00	78,82
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.800,00	0,00	0
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.281.350,00	21.271.000,00	87,60
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.400.000,00	22.773.000,00	89,66
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	25.833.900,00	10.339.500,00	40,02
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.670.000,00	47.442.080,00	91,82

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.680.380,00	216.111.648,00	93,28
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.680.380,00	129.411.648,00	93,32
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.000.000,00	86.700.000,00	93,23
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.121.200,00	54.468.400,00	90,60
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.163.200,00	23.143.800,00	85,20
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.508.000,00	19.134.600,00	93,30
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.450.000,00	9.190.000,00	97,25
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	433.870.000,00	331.096.555,00	76,31
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	69.045.000,00	46.885.000,00	67,90
Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	48.555.000,00	36.595.000,00	75,37
Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10.515.000,00	4.215.000,00	40,09
Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	9.975.000,00	6.075.000,00	60,90
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	364.825.000,00	284.211.555,00	77,90
Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	13.595.000,00	8.891.000,00	65,40
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	9.975.000,00	15,54
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	66.830.000,00	59.105.500,00	88,44

Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	160.200.000,00	160.200.000,00	100
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000,00	46.040.055,00	76,73
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.416.176.400,00	3.154.789.678,00	92,35
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	977.099.400,00	877.740.878,00	89,83
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.400.000,00	80.400.000,00	66,78
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	163.999.400,00	145.835.000,00	88,92
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130.400.000,00	128.400.000,00	98,47
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	481.900.000,00	469.505.878,00	97,43
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.400.000,00	53.600.000,00	66,67
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	896.620.000,00	832.408.800,00	92,84
Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	192.000.000,00	192.000.000,00	100
Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	248.720.000,00	185.296.800,00	74,50
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	455.900.000,00	455.112.000,00	99,83
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	472.957.000,00	375.590.000,00	79,41
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38.250.000,00	34.902.000,00	91,25
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	203.801.000,00	190.870.000,00	93,66
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	181.906.000,00	104.055.000,00	57,20

Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.900.000,00	11.891.000,00	92,18
Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	24.100.000,00	21.872.000,00	90,76
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.069.500.000,00	1.069.050.000,00	99,96
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	744.000.000,00	743.550.000,00	99,94
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	325.500.000,00	325.500.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.145.508.200,00	2.009.092.800,00	93,64
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.145.508.200,00	2.009.092.800,00	93,64
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	380.380.000,00	251.805.000,00	66,20
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.609.400,00	21.250.000,00	98,34
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.614.700.000,00	1.611.500.000,00	99,80
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	77.819.400,00	74.038.000,00	95,14
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.613.000,00	30.179.800,00	98,58
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	20.386.400,00	20.320.000,00	99,67

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Terhadap Capaian Kinerja

Pada tahun 2023 setelah dilakukan analisa program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran, dapat dilihat gambaran ada tidaknya penghematan/efisiensi sumber daya keuangan/anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk analisa efisiensi program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.6 Analisa Efisiensi Program/Kegiatan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Tahun	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Efisiensi	
				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Bertambah / (Berkurang)	Anggaran Bertambah / (Berkurang)
1.	2017	11 Program 34 Kegiatan	5.406.306.789,00		
2.	2018	10 Program 31 Kegiatan	7.821.872.000,00	(1) (3)	2.415.565.211,00
3.	2019	13 Program 30 Kegiatan	8.625.742.000,00	3 (1)	803.870.000,00
4.	2020	11 Program 28 Kegiatan	6.747.186.972,00	(2) (2)	(1.878.555.028,00)
5.	2021	4 Program 13 Kegiatan 37 Sub Kegiatan	9.787.216.050,00	(7) (15) 37	3.040.029.078,00
6.	2022	4 Program 13 Kegiatan 42 Sub Kegiatan	9.951.990.385,00	0 0 5	164.774.335,00
7.	2023	4 Program 13 Kegiatan 46 Sub Kegiatan	9.703.512.830,00	0 0 4	164.774.335,00

Dari hasil perhitungan perbandingan analisa efisiensi program/kegiatan dan anggaran Tahun 2017 dengan Tahun 2018 dapat dilihat bahwa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara ada efisiensi 1 program dan 3 kegiatan, serta ada penambahan anggaran yang berasal dari dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 2.415.565.211 atau terjadi penurunan efisiensi sebanyak 45%.

Perbandingan analisa efisiensi program dan kegiatan anggaran tahun 2019 dengan tahun 2018 tidak ada efisiensi untuk program karena pada tahun 2019 bertambah 3 (tiga) program tetapi ada efisiensi 1 (satu) kegiatan serta penambahan untuk sumber daya keuangan/anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 803.870.000,- atau sebesar 10,3%. Tidak adanya efisiensi untuk program kegiatan disebabkan karena program/kegiatan yang ada di DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 semuanya sangat menunjang atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Perbandingan analisa efisiensi program dan kegiatan tahun 2019 dengan tahun 2020 dapat dilihat terjadi efisiensi 2 program dan 2 kegiatan, serta efisiensi anggaran Rp. 1.878.555.028,- atau sebesar 21,78%.

Perbandingan analisa efisiensi program kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2020 dengan tahun 2021 dapat dilihat terjadi efisiensi 7 program, 15 kegiatan serta penambahan 37 sub kegiatan serta penambahan anggaran sebesar Rp. 3.040.029.078,- atau sebesar 31,06%, karena dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian dirubah kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021, sesuai dengan peraturan tersebut sehingga berubah menjadi 4 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

Perbandingan analisa efisiensi program kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2021 dengan tahun 2022 terdapat penambahan 5 sub kegiatan serta penambahan anggaran sebesar Rp. 164.774.335,00 atau sebesar 1,66%.

Perbandingan analisa efisiensi program kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2022 dengan tahun 2023 terdapat penambahan 4 sub kegiatan, tetapi efisiensi anggaran sebesar Rp. 248.477.555,00 atau sebesar 2,50%.

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**BAB IV
PENUTUP**

BAB IV PENUTUP

Penyusunan LAKIP Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat dan Bidang-bidang yang berada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) DPPKB untuk tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja persentase peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) telah berhasil tercapai sebesar 77,59% dari target yang ditetapkan sebesar 68% dan realisasinya mencapai 114,10%.
2. Pencapaian indikator kinerja menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) telah berhasil tercapai sebesar 5,89% dari target yang ditetapkan sebesar 7,75% dan realisasinya mencapai 131,58%.

Perubahan sistem pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya menggunakan rekapitulasi (Rek.Kab.F/I/Dal/13), sejak tahun 2022 sudah menggunakan By Name By Address (New Siga (Sistem Informasi Keluarga)) sehingga data yang disajikan lebih akurat dan akuntabel. Dengan demikian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2023 telah tercapai dengan baik. Hal ini didukung dengan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu antara lain :

- Dengan memaksimalkan fungsi dari PKB Penghubung dan penetapan sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru dan hamil;

- Dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi PKB agar pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa;
- Adanya pelatihan untuk peningkatan SDM PKB dalam pengelolaan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- Adanya dukungan dana dan sarana dari BKKBN Perwakilan Propinsi Kal-Sel serta dari DAK Fisik dan Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja;
- Adanya rapat bulanan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan;
- Peningkatan promosi dan kemitraan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang Program Bangga Kencana, memperkuat jaringan kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan lainnya ditingkat kecamatan dan desa, memperkuat dan mengoptimalkan promosi dan KIE melalui kegiatan momentum strategis;
- Meningkatkan Pelayanan KB dan Penyuluhan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait, swasta dan mitra kerja agar dapat meningkatkan kegiatan di Kampung KB;
- Meningkatkan koordinasi dan Advokasi terhadap Stakeholder untuk mendukung program kegiatan lain percepatan penurunan stunting.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dibuat dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan yang diperlukan untuk masa yang akan datang.

Amuntai, Februari 2024

KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



dr. Hj. LILY INDERIANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750507 200501 2 012